

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Realisasi Anggaran Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Alat Pengendalian Internal Dalam Perspektif Keuangan Publik Islam (Studi Kasus di SD Inpres 3/77 Panyula)

Anugrah Syahrani¹, Aksi Hamzah², Musrini Muis³

^{1,2,3}**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone**

Corresponding Author: Anugrah Syahrani, e-mail: arahafsary31@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan, serta seberapa efektif pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar khususnya SD Inpres 3/77 Panyula. Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah tolak ukur penting untuk tingkat partisipasi yang rendah. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ini mencakup guru, walimurid, dan pihak sekolah. Salah satu hak wali murid sebagai perwakilan masyarakat untuk bertanggung jawab atas penerapan program bantuan dana BOS adalah akuntabel. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, dan pengelola dana, yang merupakan pihak yang berwenang dalam mengelola dana bantuan BOS di SD Inpres 3/77 Panyula. Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Perspektif Keuangan Publik Islam. Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal saling berhubungan dan keduanya memengaruhi Perspektif Keuangan Publik Islam sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

Keywords: Akuntabilitas, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Transparansi

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an explanation and analysis of accountability, transparency, and management effectiveness, as well as how effective the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) is in primary schools, especially SD Inpres 3/77 Panyula. The principles of transparency and accountability are important benchmarks for low levels of participation. In this case, these principles cover teachers, student guardians and the school. One of the rights of student guardians as community representatives to be responsible for the implementation of the BOS funding assistance program is accountability. The researcher used a qualitative approach method, namely as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. This research involved the principal, school committee, and fund managers, who were the authorized parties in managing BOS funds at SD Inpres 3/77 Panyula. Accounting Information System, Internal Control, and Islamic Public Finance Perspective. Accounting Information Systems and Internal Control are interconnected and both influence the Islamic Public Finance Perspective as the main focus in this study.

Keywords: Accountability, School Operational Assistance Fund (BOS), Transparency

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk komitmen dalam pembiayaan pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan akses, dan memastikan keberlanjutan proses pembelajaran di sekolah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan anggaran BOS tahun 2024 mencapai Rp 57,54 triliun kepada 419.218 satuan pendidikan. Dimana pemerintah mendistribusikan dana BOS untuk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 1,8 triliun dan Kabupaten Bone menerima dana BOS sebesar Rp 91.561.060.000. Namun, pengelolaan dana BOS yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Di sisi lain, penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan anggaran dana BOS menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan proses administrasi keuangan berjalan dengan efisien dan efektif. SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Implementasi yang tepat atas SIA dapat membantu sekolah, termasuk SD Inpres 3/77 Panyula, untuk memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan kendala dalam pengelolaan anggaran BOS, seperti yang terjadi di SD Inpres 3/77 Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Salah satu permasalahan yang pernah dialami adalah keterlambatan dalam realisasi anggaran. Fenomena ini tidak hanya menghambat operasional sekolah, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan publik. Fenomena keterlambatan realisasi anggaran BOS di SD Inpres 3/77 Panyula menjadi indikasi adanya potensi kelemahan dalam penerapan sistem informasi akuntansi sebagai alat pengendalian internal.

Selain itu, efektivitas pengendalian internal merupakan kunci dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang kuat dapat memberikan jaminan bahwa penggunaan dana tidak hanya sesuai dengan ketentuan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Dalam perspektif keuangan publik Islam, pengelolaan dana pendidikan seperti BOS memiliki dimensi moral dan etis yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip seperti amanah, transparansi, dan keadilan (adl) menjadi dasar dalam memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi SIA dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS dapat selaras dengan prinsip keuangan publik Islam.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Berbagai studi, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Asep dan Tony Wr (2021), Rieza Rosdiana dkk. (2021), Dian Eriana dan Slamet Riyadi (2023), Rieza Firdausiyah dkk. (2023), Riski Hidayat dkk. (2024) serta Muhammad Fadli

Harahap dan Sugianto (2024), menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) umumnya telah diterapkan dengan cukup baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan adanya pengendalian internal yang mendukung keandalan informasi keuangan. Meski demikian, masih terdapat kekurangan seperti struktur tugas yang belum optimal dan kurangnya kelengkapan laporan keuangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menggunakan perspektif keuangan publik Islam. Perspektif ini menawarkan pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks keuangan publik Islam, pengelolaan anggaran tidak hanya dipandang sebagai upaya administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat dan Allah SWT, sehingga menuntut integritas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana BOS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal dalam realisasi anggaran dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana pengelolaan dana BOS di sekolah ini mencerminkan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan *multimode*, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis pendekatan penelitian yang peneliti lakukan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung atau observasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Subjek penelitian yaitu yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara dan guru sekolah SD Inpres 3/77 Panyula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- a. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa SD Inpres 3/77 Panyula menggunakan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai media utama pencatatan dan pengelolaan Dana BOS. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Heryanti selaku Bendahara disekolah tersebut yaitu:

“Untuk saat ini kami menggunakan aplikasi ARKAS, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.”

Terkait bagaimana sistem ini digunakan, narasumber menjelaskan alur penggunaannya secara rinci:

“Aplikasi ini diakses melalui web Kemdikbudristek, kemudian aplikasi ini digunakan untuk mencatat dana BOS dengan melakukan konfirmasi penerimaan dana di portal BOS Salur dan kemudian mendaftarkannya di ARKAS melalui menu penatausahaan. Setelah itu, sekolah dapat mulai mencatat kegiatan BKU (Buku Kas Umum) dan pembelanjaan yang sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).”

Pada saat melakukan wawancara peneliti juga diperlihatkan bagaimana proses penginputan dengan menggunakan aplikasi ARKAS ini. ARKAS tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan, tetapi juga terintegrasi dengan sistem BOS Salur sehingga memperkuat proses akuntabilitas dan transparansi dalam penerimaan serta penggunaan dana BOS. Pencatatan kegiatan keuangan melalui Buku Kas Umum juga menunjukkan bahwa aplikasi ini menggantikan pencatatan manual yang selama ini rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan laporan.

Ketika ditanya apakah isban ini efektif, Ibu Heryanti menjawab:

“Iya, ini sudah sangat membantu, isbanding dengan yang manual.”

Ibu Heryanti menyatakan bahwa penggunaan sistem ARKAS sangat efektif dan jauh lebih membantu dibandingkan dengan metode manual. Pernyataan ini didukung oleh Ibu Dewi Murni, yang menilai bahwa ARKAS lebih sederhana dan efisien, karena proses input data dilakukan langsung dalam sistem tanpa melalui banyak tahapan seperti pada metode manual.

Dalam praktik pengelolaan dana BOS, kesalahan pencatatan atau penginputan dapat terjadi. Ibu Heryanti menjelaskan bahwa aplikasi ARKAS telah menyediakan fitur pergeseran untuk melakukan koreksi, sehingga kesalahan pada bulan sebelumnya dapat dipindahkan ke bulan berikutnya. Ibu Dewi Murni menambahkan bahwa fitur ini memungkinkan perubahan waktu penganggaran, misalnya jika suatu kegiatan yang awalnya direncanakan pada bulan Januari ternyata dilaksanakan pada bulan Maret, maka pencatatan dapat disesuaikan tanpa mengubah jenis kegiatannya.

b. Prosedur Standar dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dana BOS, pihak sekolah mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam pedoman teknis resmi dari pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Heryanti, selaku Bendahara:

“Kalau dana BOS, kita berdasar pada juknis atau petunjuk teknis.”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pencatatan dan pelaporan di sekolah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mengikuti Juknis (Petunjuk Teknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peneliti juga diperlihatkan juknis dana BOS yang dikatakan oleh narasumber diatas pada saat melakukan wawancara.

Pelaporan dana BOS tidak hanya dilakukan ke tingkat internal sekolah, tetapi juga kepada pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut penjelasan dari Ibu Heryanti:

“Untuk pelaporan atau pertanggungjawabannya itu dilakukan pertahap setiap 6 (enam) bulan, kemudian biasanya juga dilakukan monev (monitoring evaluasi) sebelum dilakukan pencairan berikutnya. Pelaporannya dilakukan per semester, yaitu sekitar bulan Juni atau Juli dan bulan Desember atau Januari.”

Dalam pengelolaan dana BOS, kedua narasumber menyampaikan adanya pedoman yang digunakan sebagai acuan. Ibu Heryanti menegaskan bahwa sekolah sepenuhnya berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam pengelolaan dana. Sementara itu, Ibu Dewi Murni menyampaikan bahwa sekolah juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri yang disusun secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa selain mengikuti juknis resmi, sekolah juga berinisiatif menyusun SOP guna mendukung pelaksanaan pengelolaan dana BOS secara lebih terstruktur.

Sebelum disampaikan ke Dinas Pendidikan, laporan dana BOS diverifikasi secara internal oleh sekolah. Menurut Ibu Heryanti, Kepala Sekolah terlibat langsung dalam proses ini dengan memeriksa dan mengontrol pekerjaan Bendahara.

c. Koordinasi dan Kendali

Koordinasi yang efektif antara Kepala Sekolah, Bendahara, dan pihak terkait lainnya merupakan kunci penting dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Heryanti menyatakan:

“Setiap waktu Bendahara dan Kepala Sekolah pastinya selalu berkoordinasi, seperti setiap ada pembelanjaan pasti diketahui oleh Kepala Sekolah. Mulai dari memesan barang, serah terima barang, kuitansinya pasti Kepala Sekolah tahu.”

Koordinasi yang efektif antara Kepala Sekolah dan Bendahara menjadi kunci dalam pengelolaan dana BOS. Ibu Heryanti menyebut bahwa setiap pembelanjaan selalu dikoordinasikan dan Kepala Sekolah mengetahui seluruh proses, mulai dari pemesanan hingga serah terima dan bukti transaksi.

Setiap sistem informasi tidak terlepas dari hambatan teknis. Sekolah pun mengalami beberapa kendala saat menjalankan sistem informasi akuntansi dana BOS, sebagaimana diungkapkan Ibu Heryanti:

“Dari pengalaman kami, kendala yang sering kami hadapi misalnya ketika jaringan tidak stabil karena kami mengakses melalui web, server yang sedang diperbaiki atau maintenance, ataupun pada saat mengerjakan laporan tapi kondisi listriknya padam.”

Kendala-kendala seperti jaringan tidak stabil, server maintenance, dan pemadaman listrik menunjukkan adanya kerentanan teknis dalam infrastruktur digital. Meskipun tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan di aplikasi ARKAS, tantangan teknis ini dapat menghambat kelancaran penginputan data atau pelaporan. Peneliti juga melihat langsung pada saat melakukan observasi dan wawancara, disaat jaringan sedang tidak stabil maka di aplikasi ARKAS akan muncul tulisan “tidak terhubung dengan server”.

2. Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana BOS

a. Langkah-langkah Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berdasarkan wawancara, Ibu Heryanti menyampaikan:

“Untuk disekolah tentunya Kepala Sekolah memonitor langsung apa saja yang dilakukan mulai dari perencanaan, proses pembelanjaan hingga selesai laporan dan diketahui oleh guru-guru atau pegawai yang ada disekolah itu.”

Verifikasi dan audit internal menjadi bagian dari sistem pengendalian yang bertujuan memastikan keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan terhadap regulasi. Pengendalian internal dilakukan secara sistematis oleh sekolah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS. Ibu Heryanti menyatakan bahwa Kepala Sekolah memantau langsung seluruh proses dari perencanaan hingga pelaporan, dan melibatkan guru serta pegawai. Verifikasi dan audit internal dilakukan berdasarkan juknis yang berlaku. Selain itu, komite sekolah juga berperan sebagai mitra pengawas dalam proses pengelolaan dana, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hasan.

Pengawasan dana BOS tidak hanya dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan bendahara, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti komite sekolah. Ibu Heryanti menyampaikan:

“Untuk komite sekolah juga dilibatkan dari awal perencanaan, apa-apa yang akan di anggarkan tahun itu pastinya diketahui oleh komite sekolah. Komite sekolah hadir pada saat rapat rencana dan begitupun juga untuk laporannya ada juga yang diketahui oleh komite sekolah. Jikalaupun terjadi pergeseran, pastinya komite sekolah mengetahui hal tersebut.”

Pengawasan dana BOS tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti komite sekolah. Ibu Heryanti menjelaskan bahwa komite dilibatkan sejak awal perencanaan hingga pelaporan, termasuk saat terjadi perubahan anggaran. Bapak Hasan menambahkan bahwa biasanya ketua komite hadir dalam rapat perencanaan bersama perwakilan guru dan tenaga pendidik.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Ketika ditanyakan tentang bagaimana sekolah memastikan transparansi dalam penggunaan dana BOS, Ibu Heryanti menjelaskan:

“Kalau disekolah, kami menyediakan papan informasi mengenai rincian belanja dana BOS sehingga warga sekolah ataupun orang tua murid bisa melihat berapa jumlah penggunaan dana BOS, misal belanja barang, belanja pegawai, belanja modal dan lain lain. Semuanya tercantum dalam papan informasi penggunaan dana BOS.”

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hasan beliau mengatakan:

“Itu (menunjuk papan informasi), kadang juga ada di website diupload. Sedangkan wartawan tidak boleh mengambil itu laporan-laporan hanya bisa disampaikan, bisa mendengarkan tapi tidak bisa memeriksa, bisa ditanyakan berapa jumlahnya, berapa siswanya tapi untuk pembelanjaan ini ini ini mereka tidak bisa periksa ini karena ada memang inspektorat yang berwenang.”

Sekolah menjamin transparansi penggunaan dana BOS dengan menyediakan papan informasi yang memuat rincian belanja dana, sehingga warga sekolah dan orang tua murid dapat mengaksesnya langsung. Meskipun tidak ada mekanisme pelaporan khusus kepada masyarakat luas atau media, orang tua murid yang ingin mengetahui dapat melihat informasi tersebut di sekolah. Bapak Hasan menambahkan bahwa beberapa informasi juga diunggah di website Kemdikbud, namun laporan rinci hanya dapat diperiksa oleh inspektorat, bukan media atau masyarakat umum.

c. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko merupakan bagian integral dalam sistem pengendalian internal, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Risiko yang mungkin muncul mencakup penyalahgunaan dana, keterlambatan pencairan, hingga potensi korupsi. Dalam hal mencegah fraud Bapak Hasan mengatakan dalam wawancara:

“Selalu kita memonitoring, selalu mengingatkan, selalu anu lah mengawasi. Selama ini tidak ada karena itu transparansi selalu kita setiap pertemuan dana sudah diterima Bendahara disampaikan bahwa sekian dana ini kemudian nanti peruntukannya itu bersama guru dengan komite apa-apa yang mau dibiayai misalnya lemari, laptop, atau ada buku dan sebagainya. Tidak sembarang orang langsung mau beli begini karena ada berita acara juga.”

Pengelolaan risiko dimulai dari pemilihan Bendahara yang berintegritas tinggi dan dapat dipercaya. Bapak Hasan menegaskan pentingnya monitoring dan transparansi, dengan setiap penggunaan dana selalu disampaikan dalam rapat bersama guru dan komite serta didokumentasikan melalui berita acara. Selama ini, sekolah belum pernah mengalami penyalahgunaan dana. Jika terjadi, Kepala Sekolah akan melakukan pendekatan internal terlebih dahulu dan jika penyalahgunaan melibatkan Kepala Sekolah atau Bendahara, kasusnya akan diteruskan ke Dinas Pendidikan atau bahkan kepolisian.

3. Perspektif Keuangan Publik Islam Dalam Pengelolaan Dana BOS

a. Penerapan Prinsip Keuangan Publik Islam

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya ditinjau dari segi administratif dan teknis, tetapi juga dari segi etika serta nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam kerangka keuangan publik Islam, penggunaan

dana publik harus berlandaskan pada tanggung jawab moral dan sosial untuk kemaslahatan umum, khususnya peserta didik.

Dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan, Ibu Heryanti menjelaskan bahwa seluruh belanja dilakukan berdasarkan rencana awal yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama kebutuhan yang sifatnya mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan peserta didik. Prinsip amanah juga diwujudkan melalui penunjukan bendahara yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola dana sesuai aturan yang berlaku.

Terkait penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, Ibu Heryanti menyatakan secara singkat bahwa prinsip tersebut sudah pasti diterapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Hasan yang menjelaskan bahwa informasi terkait penggunaan dana selalu disampaikan dalam setiap pertemuan guru, termasuk sisa dana dan rencana pembiayaannya. Meskipun guru tidak memiliki wewenang langsung dalam akses terhadap laporan keuangan, mereka tetap dapat memberikan masukan yang akan dipertimbangkan selama sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan serta komitmen untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Pihak sekolah memastikan bahwa penggunaan dana BOS sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan siswa. Hal ini ditegaskan langsung oleh narasumber yang menyatakan komitmen tersebut. Adapun wujud realisasi anggaran yang telah dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasan, meliputi pengadaan sarana penunjang pembelajaran seperti dua papan tulis, satu unit laptop, lemari, dan 24 pasang kursi siswa pada tahap anggaran tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS dimanfaatkan secara nyata untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Bapak Hasan menjelaskan bahwa pengambilan keputusan keuangan di sekolah mengikuti juknis yang berlaku, termasuk batas maksimal 50% dana BOS untuk gaji. Hanya guru honorer yang memenuhi empat syarat yang dapat menerima honor. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak terdaftar di Dapodik, bantuan biasanya diberikan secara sukarela oleh guru lain sebagai bentuk kepedulian.

b. Regulasi dan Pedoman Islam Dalam Dana BOS

Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi merupakan prinsip mendasar dalam keuangan publik Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut terintegrasi, baik secara eksplisit dalam regulasi maupun implisit dalam praktik pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar.

Terkait penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan, Ibu Heryanti menegaskan bahwa penggunaan dana BOS dilakukan secara merata untuk memenuhi kebutuhan sekolah tanpa adanya diskriminasi terhadap warga sekolah. Pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan sangat baik, dapat dilihat dari ruang kelas yang sangat nyaman, ada pojok baca di setiap kelas, toilet yang bersih dan lingkungan sekolah yang asri.

Untuk memastikan tidak adanya pemborosan dana BOS, Ibu Heryanti menyampaikan:

“Sesuai dengan rencana. Kalau di juknis dana BOS memang sudah ditarget sebenarnya. Misalnya pembelanjaan pegawai tidak boleh lebih sekian % (persen).”

Dalam upaya mencegah pemborosan dana BOS, Ibu Heryanti menyatakan bahwa seluruh pengeluaran dilakukan sesuai dengan rencana dan mengacu pada juknis yang telah menetapkan batasan persentase untuk setiap jenis pembelanjaan, seperti belanja pegawai. Pada saat peneliti melakukan observasi, memang di dalam juknis tersebut telah ditetapkan mengenai batasan-batasan yang perlu di taati.

Dalam upaya menghindari penyalahgunaan dana BOS, Ibu Heryanti menekankan pentingnya memilih pengelola yang jujur, amanah, dan kompeten, khususnya bendahara. Bapak Hasan menambahkan bahwa meskipun sudah ada aturan jelas dalam juknis, seperti larangan mentransfer dana ke rekening pribadi atau meminjamkannya, masih terdapat kasus penyalahgunaan dana di sekolah lain, seperti yang terjadi di Ulaweng.

B. Pembahasan

1. Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SD Inpres 3/77 Panyula ditemukan bahwa:

a. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa SD Inpres 3/77 Panyula telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara efektif dalam pengelolaan dan pencatatan dana BOS melalui penggunaan aplikasi ARKAS. Penggunaan ARKAS menggantikan pencatatan manual yang sebelumnya dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Dengan aplikasi ini, pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan transparansi pengelolaan dana publik di lingkungan pendidikan.

Dalam praktiknya, pelatihan penggunaan ARKAS secara rutin diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan melalui kegiatan sosialisasi kepada kepala sekolah, bendahara, dan operator. Hal ini menunjukkan bahwa elemen manusia (people) sebagai salah satu komponen penting dalam SIA mendapatkan perhatian yang memadai. Meskipun kesalahan pencatatan masih mungkin terjadi, fitur “pergeseran” dalam ARKAS memberikan fleksibilitas dalam mengoreksi atau menyesuaikan anggaran tanpa mengganggu struktur ARKAS secara keseluruhan.

b. Prosedur Standar dan Pelaporan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan dan pelaporan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula dilaksanakan dengan mengacu secara ketat pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Juknis ini menjadi acuan utama sekaligus dasar hukum dan operasional dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi dana BOS. Selain itu, sekolah juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) secara internal untuk mendukung pelaksanaan teknis di lapangan.

Pelaporan dana BOS dilakukan setiap semester, yakni pada bulan Juni/Julai dan Desember/Januari yang menjadi syarat penting sebelum pencairan tahap berikutnya. Pelaporan akhir tahun dilakukan saat penutupan buku, sementara audit dilaksanakan pada awal tahun oleh berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dapat terjadi satu hingga tiga kali dalam setahun tergantung dari instansi yang melakukan audit.

Praktik pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan (pengarahan), dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

c. Koordinasi dan Kendala

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara Kepala Sekolah, Bendahara, Operator ARKAS, dan para guru menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula. Setiap proses pembelanjaan dikoordinasikan secara langsung oleh Kepala Sekolah, mulai dari pemesanan barang, proses serah terima, hingga pengumpulan bukti transaksi. Seluruh proses ini dirancang secara sistematis melalui rapat perencanaan tahunan yang dilaksanakan pada awal tahun (Januari/Februari), yang sekaligus menjadi dasar penyusunan RKAS dan pembentukan Tim BOS sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan dana BOS.

Menariknya, hubungan antara sekolah dan Dinas Pendidikan terjalin sangat baik dengan komunikasi yang lancar dan responsif. Ini menunjukkan bahwa SIA yang diterapkan melalui sistem pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak hanya mencakup unsur teknis, tetapi juga menjalin interaksi sosial yang mendukung efektivitas sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat relevansi teori Sutanto bahwa keberhasilan Sistem Informasi Akuntansi sangat bergantung pada keterpaduan komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama secara harmonis dalam satu kesatuan sistem.

2. Sistem Pengendalian Internal

a. Langkah-langkah Pengendalian Internal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula telah dijalankan melalui mekanisme yang tertata dengan baik dan melibatkan berbagai unsur sekolah. Kepala Sekolah memegang peran utama dalam memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal ini didukung oleh keterlibatan guru-guru dan pegawai sekolah, yang memperkuat aspek transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan.

Penunjukan Bendahara dilakukan secara kolektif melalui musyawarah dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan, pengalaman, dan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian, seperti status sebagai PNS. Hal ini mencerminkan adanya struktur organisasi yang mendukung pengendalian yang bertanggung jawab secara administratif dan hukum.

Bentuk pengendalian yang diterapkan terdiri dari dua jenis pendekatan, yaitu pencegahan dan deteksi. Pencegahan dilakukan melalui keterlibatan Kepala Sekolah secara langsung dalam setiap proses dan penetapan prosedur, sedangkan pendekatan deteksi diwujudkan melalui pemeriksaan oleh komite sekolah serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Pendekatan ganda ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat, laporan disusun secara akurat, dan seluruh proses mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula telah mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang

baik. Salah satu bentuk konkrit dari transparansi ini adalah penyediaan papan informasi di lingkungan sekolah yang memuat rincian penggunaan dana BOS, seperti pengeluaran untuk barang, pegawai, dan kebutuhan modal. Media informasi ini dapat diakses oleh warga sekolah maupun orang tua siswa, sehingga menumbuhkan rasa percaya terhadap manajemen keuangan sekolah.

Dari sisi teori pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, temuan ini mengindikasikan bahwa sekolah telah memenuhi sejumlah unsur penting. Pertama, dari aspek lingkungan pengendalian, terlihat adanya komitmen Kepala Sekolah dan seluruh jajaran untuk menjaga integritas, serta memastikan penggunaan dana dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Pemilihan bendahara berdasarkan musyawarah dan pertimbangan kompetensi juga menunjukkan adanya standar profesionalisme dalam pengelolaan.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula telah mencerminkan praktik yang selaras dengan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak adanya keluhan dari masyarakat, serta adanya apresiasi terhadap pemanfaatan dana BOS untuk mendukung kegiatan siswa, menjadi bukti bahwa sekolah telah menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel.

c. Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, manajemen risiko dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula telah diterapkan secara menyeluruh dengan pendekatan pencegahan dan sistem pengawasan internal yang terstruktur. Pemilihan Bendahara yang memenuhi kriteria integritas, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem yang andal. Ini menunjukkan bahwa sekolah telah membentuk struktur organisasi yang mendukung pengelolaan aset keuangan secara aman dan bertanggung jawab.

Dari sisi teori pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, yaitu terbentuknya budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan transparansi. Penunjukan personal dengan latar belakang integritas yang kuat serta keterlibatan aktif pimpinan dalam proses pengelolaan dana merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap pengendalian yang sehat.

Aspek pemantauan juga terlihat kuat melalui pengawasan langsung oleh Kepala Sekolah serta keterlibatan pengawasan kolektif oleh guru dan komite. Meskipun tidak selalu formal, proses evaluasi ini dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, memastikan bahwa pelaksanaan penggunaan dana tetap sesuai dengan peraturan dan kebutuhan operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SD Inpres 3/77 Panyula telah menerapkan sistem manajemen risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip pengendalian internal, baik dari sisi struktur, mekanisme, hingga etika. Praktik ini tidak hanya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana BOS, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perspektif Keuangan Publik Islam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula menunjukkan bahwa meskipun sekolah ini bukan lembaga pendidikan berbasis Islam,

nilai-nilai inti dalam keuangan publik Islam telah dijalankan dalam setiap tahap pengelolaan dana. Hal ini terlihat dari cara sekolah menjaga kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta orientasi kepada kemaslahatan dalam penggunaan dana.

Penunjukan Bendahara yang didasarkan pada integritas dan rekam jejak yang baik mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Ini sejalan dengan nilai dasar dalam etika keuangan Islam, di mana seseorang yang mengelola dana publik harus dapat dipercaya dan memiliki kesadaran tanggung jawab yang melekat dalam dirinya.

Komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan tercermin dalam pembelanjaan dana yang berfokus pada kebutuhan nyata siswa, seperti penyediaan sarana belajar, bukan kepentingan administratif semata. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keuangan dilandasi semangat untuk memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat utama, yaitu peserta didik. Pengeluaran yang dilakukan pun senantiasa mengacu pada rencana kerja yang disusun secara partisipatif dan disetujui bersama, yang menggambarkan adanya keseimbangan dan kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya.

Dari sisi akuntabilitas, sekolah telah menunjukkan kesadaran tinggi dengan melaksanakan proses dokumentasi yang lengkap, melibatkan pengawasan kolektif, dan mengikuti batasan serta pedoman teknis dari pemerintah. Meskipun tidak disebutkan sebagai "akuntabilitas syariah", tindakan tersebut mencerminkan prinsip bahwa pengelola dana wajib memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana publik.

Meskipun tidak ada penyebutan formal terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini telah menjalankan nilai-nilai keuangan publik Islam secara substantif. Pengelolaan dana BOS dilakukan dengan dasar amanah, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta orientasi terhadap kemanfaatan publik, yang kesemuanya merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tentang analisis sistem informasi akuntansi pada realisasi anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai alat pengendalian internal dalam perspektif keuangan publik Islam (studi kasus di SD Inpres 3/77 Panyula, kecamatan tantete riattang timur, kabupaten bone) maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Inpres 3/77 Panyula telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi secara efektif melalui penggunaan aplikasi ARKAS, yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan keuangan sekolah. Prosedur pelaporan dilakukan secara teratur sesuai petunjuk teknis, didukung oleh verifikasi internal dan audit eksternal yang mencerminkan adanya sistem pengendalian yang baik. Koordinasi antara kepala sekolah, bendahara, operator ARKAS, guru, serta pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan BPK berjalan dengan harmonis, menunjukkan integrasi antar komponen sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan pencairan, pihak sekolah mampu mengatasinya dengan tanggap dan fleksibel, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana tetap berjalan optimal dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
- b. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa SD Inpres 3/77 Panyula telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan menyeluruh dalam pengelolaan

dana BOS. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui keterlibatan Kepala Sekolah, Bendahara, guru, serta komite sekolah sebagai unsur pengawas eksternal, yang mencerminkan struktur organisasi yang bertanggung jawab. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan informasi terbuka kepada warga sekolah dan dokumentasi pelaporan yang tertib, sedangkan prinsip manajemen risiko diterapkan melalui pendekatan pencegahan, deteksi, dan kesiapsiagaan terhadap situasi darurat seperti keterlambatan pencairan dana. Praktik ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah, termasuk lingkungan pengendalian yang etis, penilaian risiko yang cermat, kegiatan pengendalian yang terdokumentasi, sistem komunikasi yang terbuka, dan pemantauan berkelanjutan, sehingga pengelolaan dana BOS di sekolah ini dapat dinilai profesional, transparan, dan akuntabel.

- c. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun SD Inpres 3/77 Panyula bukan merupakan lembaga pendidikan Islam, pengelolaan dana BOS di sekolah ini telah mencerminkan nilai-nilai dasar keuangan publik Islam secara substantif. Prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi tercermin dalam penunjukan bendahara yang berintegritas, pembelanjaan dana yang fokus pada kebutuhan peserta didik, melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, serta keterbukaan informasi kepada warga sekolah dan orang tua. Komitmen terhadap akuntabilitas juga tampak dari pelaporan yang tertib, dokumentasi yang lengkap, dan kesediaan pihak sekolah untuk menanggung risiko operasional demi menjaga kelangsungan pendidikan. Dengan demikian, praktik keuangan di SD Inpres 3/77 Panyula telah selaras dengan semangat pengelolaan keuangan publik Islam, yaitu menjamin kebermanfaatan, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral dalam penggunaan dana publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, D. E. N., & Riyadi, S. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di Smp Negeri 4 Kota Mojokerto). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 221-226.
- Hidayat, S. R. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Journal Research of Economic and Bussiness*, 3(01), 47-56.
- Rosdiana, R. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana BOS. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 185-193.
- Sari, R., Hamidy, F., & Suaidah, S. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Konveksi Sjm Bandar Lampung. *J. Teknol. dan Sist. Inf*, 2(1), 65-73.
- Wijaya, G. K. A. W., Suhaedi, W., & Waskito, I. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 218-229.
- WR, M. A. T. (2021). Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengeluaran dan Penerimaan Kas pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi. *Nusantara Hasana Journal*, 1(4), 65-71.
- Yuliani, T. K., Darma, T., & Sari, R. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Sekolah (Studi Kasus: Kelompok Bermain Ananda Rasya). *J. Teknol. dan Sist. Inf*, 3(4), 1-11.